

ABSTRAK

ADVOCACY COALITION FRAMEWORK (ACF) DALAM TATA KELOLA PERKOTAAN BERBASIS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA MAKASSAR (dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan Andi Luhur Prianto)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran koalisi pemerintah-swasta dan peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari informan sebanyak enam orang yang ditetapkan secara *purposive* dan dianalisa melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan *political will* dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen pada sektor swasta. Dari sisi sumberdaya, LSM melibatkan sumberdaya manusia untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan secara sukarela dan sumberdaya sektor privat melalui program CSR. Salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia. Strategi yang ditekankan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan ini dapat meningkatkan ruang terbuka hijau. Keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota. LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan dan juga termasuk urgensi pengelolaan RTH yang masih jauh dari target sekaligus tuntutan kepada pemerintah kota untuk lebih konsisten dalam urusan alih fungsi lahan. Tindakan yang paling nyata dari Koalisi Pemerintah-LSM adalah pengawasan pengalihfungsian lahan RTH dan pembinaan atau edukasi sementara Koalisi pemerintah-swasta lebih berorientasi pada segmentasi program CSR yang mereka rencanakan.

Kata Kunci : ACF, Tata Kelola Perkotaan, RTH.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the public-private coalition and the role of the government-NGO coalition in Green Open Space Based Urban Governance in Makassar City. This type of research is qualitative, data obtained through interviews, observation, and documentation. Data is collected and analyzed through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the confidence of the private sector / private sector towards city green space policy is still low due to the political will problem of the government that does not involve all components in the private sector. In terms of resources, NGOs involve human resources to be active in voluntary environmental activities and private sector resources through CSR programs that are strengthened by funding. One of the strategies is the optimization of planters in RTR strategic areas such as the Untia Region. The strategy emphasized by the private sector is that segmentation in this activity can increase green open space. The decision taken by the private or private sector is based on the mission of the organization itself which has environmental concerns as outlined through the CSR program, the program has not been intervened by the city government. NGOs that provide input in terms of environmental impact protection and also include the urgency of managing green space that is still far from the target as well as demands to the city government to be more consistent in matters of land use change. The most obvious action from the Government-NGO Coalition is the supervision of the conversion of RTH land and coaching or education while the public-private Coalition is more oriented to the segmentation of the CSR programs they plan.

Keywords: ACF, Urban Governance, RTH.

